

Pendampingan Pelaksanaan ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer) pada Sekolah Kesetaraan PKBM TUNAS MEKAR

Lotar Mateus Sinaga¹, Sardo Pardingotan Sipayung², Andy Paul Harianja³

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan.

Email: lotarmateus88@gmail.com

Keywords:
ANBK, PKBM,
Sekolah
Kesetaraan,
Pendampingan

Abstrak.

Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) merupakan instrumen evaluasi mutu pendidikan yang bertujuan mengukur literasi, numerasi, dan karakter peserta didik. Sekolah kesetaraan, khususnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan ANBK, seperti keterbatasan sarana prasarana, rendahnya literasi digital, serta kurangnya pemahaman teknis pengelola dan peserta didik. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan di PKBM Tunas Mekar dengan tujuan meningkatkan kesiapan lembaga dalam menyelenggarakan ANBK secara mandiri dan optimal. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi kebijakan ANBK, pelatihan teknis penggunaan aplikasi ANBK, simulasi pelaksanaan asesmen, serta pendampingan saat pelaksanaan berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengelola, proktor, dan peserta didik terhadap prosedur ANBK, serta meningkatnya kesiapan teknis dan mental peserta didik dalam mengikuti asesmen. Pendampingan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan nonformal dan mendukung pelaksanaan Asesmen Nasional yang inklusif dan berkelanjutan.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter, nilai, serta kemampuan berpikir kritis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global. Dalam konteks pembangunan nasional, peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya peningkatan mutu pendidikan tersebut tidak hanya difokuskan pada jalur pendidikan formal, tetapi juga mencakup pendidikan nonformal dan informal yang memiliki peran strategis dalam pemerataan akses pendidikan.

Sebagai bagian dari reformasi sistem evaluasi pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Nasional. Asesmen Nasional dirancang sebagai instrumen evaluasi yang komprehensif untuk memetakan mutu satuan pendidikan berdasarkan tiga komponen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang mencakup literasi dan numerasi, Survei Karakter, serta Survei Lingkungan Belajar. Pelaksanaan Asesmen Nasional dilakukan secara berbasis komputer melalui Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), sehingga menuntut kesiapan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, serta kemampuan literasi digital yang memadai dari seluruh satuan pendidikan. ANBK tidak bertujuan untuk menilai capaian individu peserta didik secara akademik semata, melainkan untuk memperoleh gambaran kualitas proses dan hasil pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, hasil ANBK diharapkan dapat dimanfaatkan oleh sekolah dan pemangku kepentingan sebagai dasar perencanaan program peningkatan mutu

pembelajaran yang berkelanjutan. Namun demikian, pelaksanaan ANBK di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada satuan pendidikan nonformal seperti sekolah kesetaraan yang dikelola oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

PKBM merupakan lembaga pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. Keberadaan PKBM sangat penting dalam mendukung kebijakan pendidikan inklusif dan pemerataan layanan pendidikan. Peserta didik di PKBM umumnya memiliki latar belakang yang beragam, baik dari segi usia, tingkat sosial ekonomi, maupun pengalaman belajar. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan kebijakan pendidikan nasional, termasuk dalam pelaksanaan ANBK yang berbasis teknologi. Dalam konteks pelaksanaan ANBK, PKBM sering menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti ketersediaan komputer, jaringan internet yang stabil, serta ruang pelaksanaan asesmen yang memadai. Selain itu, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, baik pengelola maupun proktor, dalam memahami kebijakan, prosedur, dan teknis pelaksanaan ANBK. Rendahnya literasi digital peserta didik juga menjadi kendala yang dapat memengaruhi kelancaran dan hasil asesmen. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pelaksanaan ANBK tidak optimal dan hasil yang diperoleh kurang mencerminkan kondisi mutu pembelajaran yang sesungguhnya.

PKBM Tunas Mekar sebagai salah satu lembaga pendidikan kesetaraan dihadapkan pada permasalahan serupa dalam mempersiapkan dan melaksanakan ANBK. Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan pihak pengelola, ditemukan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai konsep Asesmen Nasional, khususnya perbedaan antara ANBK dengan ujian berbasis hasil belajar individu. Selain itu, pengelola dan proktor masih memerlukan pendampingan teknis terkait penggunaan aplikasi ANBK, manajemen pelaksanaan asesmen, serta strategi pendampingan peserta didik agar siap secara mental dan teknis dalam mengikuti asesmen berbasis komputer. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa diperlukan upaya pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mendukung PKBM dalam melaksanakan ANBK secara efektif. Pendampingan tidak hanya difokuskan pada aspek teknis penggunaan perangkat dan aplikasi, tetapi juga mencakup pemahaman konseptual mengenai tujuan dan manfaat Asesmen Nasional, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan PKBM. Dengan adanya pendampingan yang tepat, diharapkan PKBM dapat melaksanakan ANBK secara mandiri, tertib, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Kegiatan pendampingan pelaksanaan ANBK pada PKBM Tunas Mekar dirancang sebagai bagian dari Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nonformal. Pendampingan ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari sosialisasi kebijakan ANBK, pelatihan teknis bagi pengelola dan proktor, simulasi pelaksanaan asesmen, hingga pendampingan langsung saat pelaksanaan ANBK berlangsung. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesiapan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ANBK. Selain itu, pendampingan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan peserta didik dalam menghadapi asesmen berbasis komputer, khususnya dalam aspek literasi digital dan pengelolaan kecemasan saat mengikuti asesmen. Peserta didik diberikan kesempatan untuk berlatih menggunakan perangkat komputer, mengenal antarmuka aplikasi ANBK, serta memahami jenis soal literasi dan numerasi yang diujikan. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga memiliki kepercayaan diri yang lebih baik dalam mengikuti ANBK.

Pelaksanaan pendampingan ANBK pada PKBM Tunas Mekar diharapkan memberikan dampak positif yang berkelanjutan, baik bagi lembaga maupun peserta didik. Bagi lembaga, kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mengelola asesmen nasional dan memanfaatkan hasilnya sebagai dasar perbaikan pembelajaran. Bagi peserta didik, pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman belajar, literasi digital, serta kesiapan menghadapi tantangan pembelajaran di era digital. Dengan demikian, kegiatan pendampingan pelaksanaan ANBK ini memiliki relevansi yang kuat dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nonformal dan mendukung kebijakan Asesmen Nasional yang inklusif. Melalui sinergi antara perguruan tinggi, PKBM, dan pemangku kepentingan terkait, diharapkan pelaksanaan ANBK di sekolah kesetaraan dapat berjalan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

1. Pendidikan sebagai Pilar Pembangunan Nasional

Pendidikan merupakan faktor fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan potensi intelektual, keterampilan, dan karakter yang dibutuhkan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan berperan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing bangsa di era globalisasi (Tilaar, 2012). Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan menjadi agenda utama pemerintah, tidak hanya pada jalur pendidikan formal, tetapi juga pada jalur pendidikan nonformal dan informal. Pendidikan nonformal hadir sebagai alternatif dan pelengkap pendidikan formal dalam menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sepanjang hayat. Keberadaan pendidikan nonformal menjadi sangat penting bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal karena berbagai keterbatasan, seperti kondisi ekonomi, geografis, maupun usia.

2. Pendidikan Nonformal dan Peran PKBM

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal (Sudjana, 2010). Salah satu bentuk pendidikan nonformal yang berkembang di Indonesia adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM merupakan lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang menyelenggarakan berbagai program pendidikan, termasuk pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Program pendidikan kesetaraan dirancang untuk memberikan layanan pendidikan yang setara dengan pendidikan formal, baik dari segi kompetensi akademik maupun kecakapan hidup (Kemdikbud, 2020). PKBM memiliki peran strategis dalam mendukung pemerataan pendidikan dan pengurangan angka putus sekolah. Namun, dalam pelaksanaannya, PKBM sering menghadapi keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Tantangan ini semakin kompleks ketika PKBM dihadapkan pada tuntutan implementasi kebijakan pendidikan berbasis teknologi, seperti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

3. Evaluasi dan Asesmen dalam Pendidikan

Evaluasi pendidikan merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Salah satu komponen utama dalam evaluasi pendidikan adalah asesmen. Asesmen didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik serta kualitas proses pembelajaran (Nitko & Brookhart, 2014). Asesmen dalam pendidikan modern tidak hanya berorientasi pada hasil belajar peserta didik, tetapi juga digunakan sebagai alat refleksi untuk perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu satuan pendidikan. Oleh karena itu, sistem asesmen harus dirancang secara komprehensif, adil, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman.

4. Kebijakan Asesmen Nasional

Asesmen Nasional merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memetakan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Asesmen Nasional menggantikan Ujian Nasional yang sebelumnya berfokus pada capaian individu peserta didik. Asesmen Nasional menekankan pada pengukuran kualitas proses dan hasil pembelajaran secara menyeluruh (Kemdikbud, 2021). Asesmen Nasional terdiri atas tiga instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Ketiga instrumen tersebut dirancang untuk memberikan gambaran utuh mengenai mutu pendidikan, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan praktik pembelajaran di satuan pendidikan.

5. Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK)

ANBK merupakan bentuk pelaksanaan Asesmen Nasional yang menggunakan teknologi komputer sebagai media utama. Penggunaan komputer dalam asesmen diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi pelaksanaan evaluasi pendidikan. Selain itu, ANBK juga mendorong satuan pendidikan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam pengelolaan pendidikan.

Namun, pelaksanaan ANBK menuntut kesiapan infrastruktur, seperti perangkat komputer, jaringan internet, dan sistem pendukung lainnya. Bagi satuan pendidikan nonformal seperti PKBM, keterbatasan fasilitas teknologi menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan ANBK secara optimal.

6. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) merupakan instrumen utama dalam Asesmen Nasional yang bertujuan mengukur kemampuan literasi membaca dan numerasi peserta didik. Literasi membaca mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, dan merefleksikan teks, sedangkan numerasi berkaitan dengan kemampuan berpikir matematis dalam memecahkan masalah kontekstual (OECD, 2019). AKM tidak mengukur penguasaan materi kurikulum secara spesifik, melainkan kompetensi esensial yang diperlukan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21 yang menekankan pada kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan.

7. Literasi Digital dalam Pelaksanaan ANBK

Literasi digital merupakan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital secara efektif, kritis, dan bertanggung jawab. Menurut Gilster (1997), literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan memahami dan mengevaluasi informasi digital. Dalam konteks ANBK, literasi digital menjadi kompetensi kunci bagi pengelola, proktor, dan peserta didik. Pengelola dan proktor harus memahami sistem aplikasi ANBK, sedangkan peserta didik perlu memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan komputer dan menjawab soal berbasis digital. Rendahnya literasi digital dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan ANBK dan validitas hasil asesmen.

8. Tantangan Pelaksanaan ANBK di PKBM

Pelaksanaan ANBK di PKBM menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sarana prasarana teknologi, rendahnya literasi digital, serta minimnya pengalaman dalam melaksanakan asesmen berbasis komputer. Selain itu, karakteristik peserta didik PKBM yang heterogen dari segi usia dan latar belakang pendidikan juga memengaruhi kesiapan mereka dalam mengikuti ANBK (Sihotang, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya intervensi berupa pendampingan yang terencana dan berkelanjutan agar PKBM mampu melaksanakan ANBK secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Konsep Pendampingan dalam Pendidikan

Pendampingan merupakan proses pemberian dukungan dan fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas individu atau lembaga. Pendampingan dalam pendidikan bertujuan memberdayakan sasaran agar mampu mandiri dalam mengelola kegiatan pendidikan (Priyono & Pranarka, 1996).

Pendampingan yang efektif bersifat partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata di lapangan. Dalam pelaksanaan ANBK, pendampingan mencakup aspek teknis, manajerial, dan psikologis, baik bagi pengelola maupun peserta didik.

10. Pendampingan sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

Pendampingan terbukti menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama pada satuan pendidikan dengan keterbatasan sumber daya. Melalui pendampingan, satuan pendidikan dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperbaiki manajemen, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi (Mulyasa, 2018).

Dalam konteks PKBM, pendampingan ANBK tidak hanya bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan asesmen, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kapasitas kelembagaan dan literasi digital secara berkelanjutan.

11. Relevansi Pendampingan ANBK bagi Pendidikan Kesetaraan

Pendampingan pelaksanaan ANBK memiliki relevansi yang tinggi bagi pendidikan kesetaraan karena mendukung prinsip inklusivitas dan keadilan dalam evaluasi pendidikan. Melalui pendampingan,

PKBM memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam sistem evaluasi nasional dan memanfaatkan hasil asesmen sebagai dasar perbaikan pembelajaran.

Dengan demikian, pendampingan ANBK berkontribusi langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan nonformal dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Hasil Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pendampingan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) pada Sekolah Kesetaraan PKBM Tunas Mekar dirancang dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, yang melibatkan secara aktif pengelola PKBM, Proktor, dan peserta didik. Pendekatan ini bertujuan agar mitra tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi juga berperan sebagai subjek yang terlibat langsung dalam setiap tahapan pelaksanaan, sehingga mampu mandiri setelah kegiatan pendampingan berakhir.

1. Jenis dan Pendekatan Kegiatan

Kegiatan ini merupakan bentuk **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** yang berfokus pada peningkatan kapasitas lembaga pendidikan nonformal dalam melaksanakan kebijakan nasional di bidang evaluasi pendidikan. Pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Edukatif, melalui pemberian pemahaman konseptual terkait Asesmen Nasional dan ANBK.
2. Pendekatan Praktis, melalui pelatihan teknis dan simulasi pelaksanaan ANBK.
3. Pendekatan Pendampingan, melalui bimbingan langsung sebelum dan saat pelaksanaan ANBK berlangsung.

Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik PKBM yang membutuhkan penguatan baik dari sisi pemahaman kebijakan maupun keterampilan teknis.

2. Lokasi dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan pendampingan dilaksanakan di PKBM Tunas Mekar, yang merupakan lembaga pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan. Sasaran kegiatan meliputi:

1. Pengelola PKBM, sebagai penanggung jawab pelaksanaan ANBK.
2. Proktor/Pendidik, sebagai pendamping peserta didik dan pendukung teknis pelaksanaan.
3. Peserta Didik Sekolah Kesetaraan, sebagai peserta ANBK.

Keterlibatan seluruh unsur tersebut diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam pelaksanaan ANBK secara optimal.

3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan pendampingan ANBK ini terdiri atas beberapa tahapan utama sebagai berikut:

3.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan mitra serta menyusun rencana kegiatan yang sesuai. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

1. Koordinasi Awal dengan Mitra, untuk menyepakati tujuan, waktu, dan teknis pelaksanaan kegiatan.
2. Observasi dan Identifikasi Kebutuhan, meliputi kondisi sarana prasarana, kesiapan sumber daya manusia, dan tingkat literasi digital.
3. Penyusunan Materi Pendampingan, yang mencakup kebijakan ANBK, teknis pelaksanaan, dan simulasi asesmen.
4. Penyusunan Jadwal dan Pembagian Tugas, agar kegiatan berjalan efektif dan terstruktur.

3.2 Tahap Sosialisasi ANBK

Tahap sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengelola dan proktor mengenai konsep dan tujuan Asesmen Nasional. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Penjelasan kebijakan Asesmen Nasional dan perbedaannya dengan ujian nasional.

2. Pemaparan komponen ANBK, yaitu AKM, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.
3. Diskusi mengenai peran PKBM dalam pelaksanaan ANBK.
4. Tanya jawab untuk mengklarifikasi pemahaman mitra.

Sosialisasi ini diharapkan dapat membangun persepsi yang sama terkait pentingnya ANBK sebagai alat pemetaan mutu pendidikan.

3.3 Tahap Pelatihan Teknis

Tahap pelatihan teknis bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pengelola dan proktor dalam melaksanakan ANBK. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

1. Pelatihan penggunaan aplikasi ANBK bagi proktor dan teknisi.
2. Pengenalan sistem login, pengaturan sesi, dan manajemen peserta.
3. Simulasi penanganan kendala teknis, seperti gangguan jaringan dan perangkat.
4. Pengenalan jenis soal AKM dan karakteristik soal berbasis literasi dan numerasi.

Pelatihan ini dilakukan secara praktik langsung agar peserta pelatihan memperoleh pengalaman nyata dalam mengelola ANBK.

3.4 Tahap Pendampingan Peserta Didik

Tahap ini difokuskan pada peningkatan kesiapan peserta didik dalam mengikuti ANBK. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Pengenalan perangkat komputer dan cara penggunaannya.
2. Latihan mengerjakan soal AKM berbasis komputer.
3. Simulasi ANBK untuk membiasakan peserta didik dengan alur asesmen.
4. Pendampingan psikologis untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi kecemasan peserta didik.

Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan teknis dan mental peserta didik.

3.5 Tahap Pendampingan Pelaksanaan ANBK

Pada tahap ini, tim pendamping melakukan pendampingan langsung saat pelaksanaan ANBK berlangsung. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Pendampingan teknis bagi proktor dan teknisi.
2. Pemantauan pelaksanaan asesmen agar sesuai dengan prosedur.
3. Penanganan permasalahan teknis yang muncul secara cepat dan tepat.
4. Dokumentasi kegiatan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.

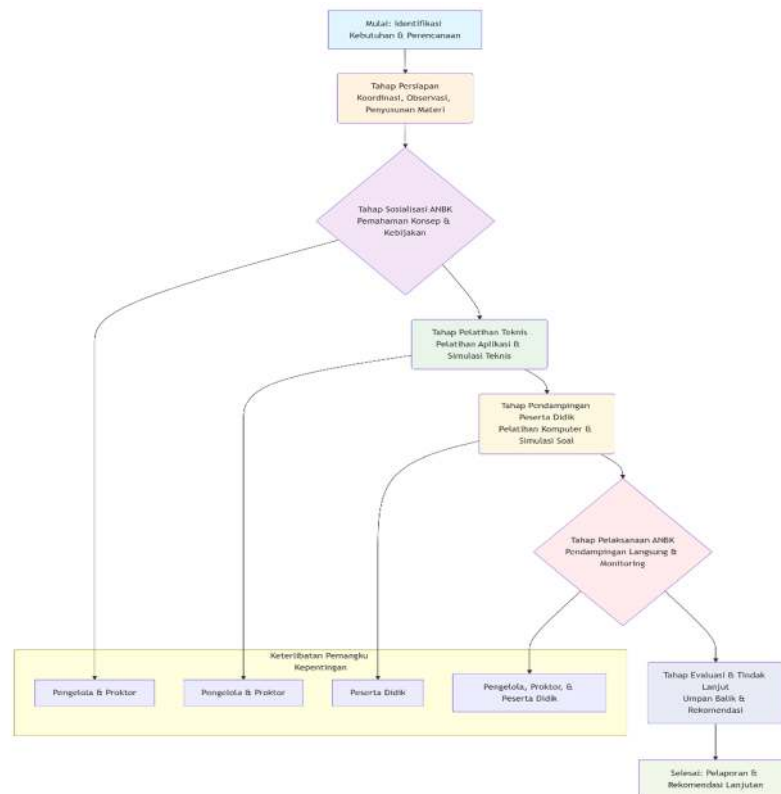
Pendampingan langsung ini bertujuan untuk memastikan ANBK berjalan dengan lancar dan tertib.

3.6 Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Tahap evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pendampingan dan merumuskan tindak lanjut. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan melalui diskusi dan umpan balik dari mitra.
2. Analisis peningkatan pemahaman dan keterampilan pengelola, proktor, dan peserta didik.
3. Penyusunan laporan kegiatan dan rekomendasi perbaikan.
4. Perencanaan tindak lanjut berupa pendampingan lanjutan atau penguatan kapasitas kelembagaan.

3.7 Flowchart Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 1. Flowchart Pelaksanaan Kegiatan

4. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Data kegiatan diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan refleksi kegiatan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan proses dan hasil pendampingan ANBK. Data tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan laporan dan rekomendasi perbaikan.


5. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan pendampingan diukur berdasarkan:

1. Meningkatnya pemahaman pengelola dan proktor tentang ANBK.
2. Meningkatnya keterampilan teknis dalam pelaksanaan ANBK.
3. Meningkatnya kesiapan dan kepercayaan diri peserta didik.
4. Terlaksananya ANBK secara tertib dan sesuai prosedur.



Gambar 2. Pelaksanaan ANBK








**DAFTAR HADIR PESERTA
ASESMEN NASIONAL PAKET B
TAHUN 2025**

KOTAKABUPATEN : KAB. DELI SERDANG KODE : 09

SEKOLAH/MADRASAH : PKBM TUNAS MEKAR KODE : 0015

ID SERVER / RUANG : X07090015-BJ1B / RUANG 001 SESI : 1

HARI : Kamis TANGGAL : 28 Agustus 2025 PUKUL : 07.30-09.40

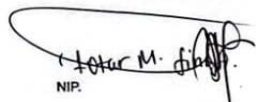
No.	Username	Nama Peserta	Tanda Tangan	Mata Pelajaran
1	B0709001500018	NABILA FEBIANA	1. ABSEN	Numerasi & Survei Lingkungan Belajar
2	B0709001500027	NOVELINE KAREN WONG	2. 	Numerasi & Survei Lingkungan Belajar
3	B0709001500036	fahri ramadhan syah	3. 	Numerasi & Survei Lingkungan Belajar
4	B0709001500045	REJA		Numerasi & Survei Lingkungan Belajar
5	B0709001500054	ZIKRI ALFARIZI	5. ABSEN	Numerasi & Survei Lingkungan Belajar
6	B0709001500063	SATRIO ADITYA		Numerasi & Survei Lingkungan Belajar
7	B0709001500072	KHAIRUL AJJMI	7. 	Numerasi & Survei Lingkungan Belajar

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk sekolah, kota/kab dan Provinsi.
- Pengawas ruang menyalang Nama Peserta yang tidak hadir.
- Daftar hadir untuk pusat di upload melalui web ANBK.

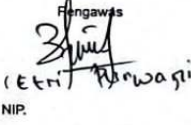
Jumlah Peserta yang Seharusnya Hadir :	<u>7</u> peserta
Jumlah Peserta yang Tidak Hadir :	<u>2</u> peserta
Jumlah Peserta Hadir :	<u>5</u> peserta

Proktor



NIP.

Pengawas


















NIP.

Gambar 3. Daftar Hadir ANBK Paket B



**DAFTAR HADIR PESERTA
ASESMEN NASIONAL PAKET C
TAHUN 2025**

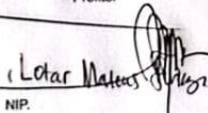

KOTA/KABUPATEN : KAB. DELI SERDANG KODE : 09
 SEKOLAH/MADRASAH : PKBM TUNAS MEKAR KODE : 0015
 ID SERVER / RUANG : X07090015-AQ4C / RUANG 001 SESI : 1
 HARI : Rabu TANGGAL : 06 Agustus 2025 PUKUL : 07.30-09.40

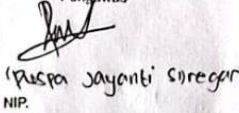

No.	Username	Nama Peserta	Tanda Tangan	Mata Pelajaran
1	C0709001500018	Rangga Pratama	1. 	Literasi & Survei Karakter
2	C0709001500027	RAHMAD RIDHO	2. 	Literasi & Survei Karakter
3	C0709001500036	NATASYA NABILLA	3. 	Literasi & Survei Karakter
4	C0709001500045	SYAMSIATI MEILINDA	4. 	Literasi & Survei Karakter
5	C0709001500054	NOVIAL HERDIANTA	5. 	Literasi & Survei Karakter
6	C0709001500063	FAZRY NIRANGGA	6. 	Literasi & Survei Karakter
7	C0709001500072	NUR FADLI	7. 	Literasi & Survei Karakter
8	C0709001500089	NICKY SOFYANI	8. 	Literasi & Survei Karakter
9	C0709001500098	MHD. ARI SYAHPUTRA	9. 	Literasi & Survei Karakter
10	C0709001500107	ANDIKA	10. 	Literasi & Survei Karakter
11	C0709001500116	YAYANG SATRIO	11. 	Literasi & Survei Karakter
12	C0709001500125	MHD ARIF	12. 	Literasi & Survei Karakter
13	C0709001500134	RAHMAN HARIS	13. 	Literasi & Survei Karakter
14	C0709001500143	Mhd. Hendrawan Sagala	14. 	Literasi & Survei Karakter
15	C0709001500152	SAIFUL AMRI	15. 	Literasi & Survei Karakter

Keterangan :

1. Dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk sekolah, kota/kab dan Provinsi.
2. Pengawas ruang menyalang Nama Peserta yang tidak hadir.
3. Daftar hadir untuk pusat di upload melalui web ANBK.

Jumlah Peserta yang Seharusnya Hadir :	15 peserta
Jumlah Peserta yang Tidak Hadir :	1 peserta
Jumlah Peserta Hadir :	14 peserta

Proktor : 
 NIP. 

Pengawas : 
 NIP. 

Gambar 4. Daftar Hadir ANBK Paket C

Kesimpulan

Kegiatan pendampingan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) pada Sekolah Kesetaraan PKBM Tunas Mekar telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan persiapan, sosialisasi, pelatihan teknis, simulasi, pendampingan peserta didik, pendampingan pelaksanaan, serta evaluasi dan tindak lanjut. Pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang diterapkan dalam kegiatan ini memungkinkan keterlibatan aktif pengelola, proktor, dan peserta didik, sehingga proses pendampingan berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan mitra. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengelola dan proktor mengenai kebijakan Asesmen Nasional, khususnya konsep, tujuan, serta prosedur pelaksanaan ANBK. Selain itu, keterampilan teknis pengelola dan proktor dalam mengoperasikan aplikasi ANBK, mengelola sesi asesmen, serta menangani kendala teknis juga mengalami peningkatan. Dari sisi peserta didik, pendampingan yang dilakukan mampu meningkatkan kesiapan teknis dalam menggunakan perangkat komputer, pemahaman terhadap karakteristik soal AKM, serta kesiapan mental dan kepercayaan diri dalam mengikuti asesmen berbasis komputer.

Pelaksanaan pendampingan ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan sarana prasarana dan literasi digital pada satuan pendidikan nonformal seperti PKBM dapat diminimalkan melalui pendampingan yang terencana dan berkelanjutan. Dengan dukungan pendampingan yang tepat, PKBM Tunas Mekar mampu melaksanakan ANBK secara tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan pelaksanaan ANBK ini berkontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan PKBM dan mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan nonformal. Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer) pada Sekolah Kesetaraan PKBM TUNAS MEKAR : Lotar Mateus Sinaga, Sardo Pardingotan Sipayung, Andy Paul Harianja 68

ini diharapkan dapat menjadi model pendampingan bagi PKBM lain dalam menghadapi pelaksanaan Asesmen Nasional, serta mendorong terwujudnya sistem evaluasi pendidikan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Ke depan, diperlukan pendampingan lanjutan dan penguatan sarana prasarana teknologi agar pelaksanaan ANBK di sekolah kesetaraan dapat semakin optimal.

Daftar Pustaka

- [1]. Gilster, P. (1997). *Digital Literacy*. New York: John Wiley & Sons.
- [2]. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan*. Jakarta: Kemdikbud.
- [3]. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). *Asesmen Nasional: Panduan Pembelajaran dan Asesmen*. Jakarta: Kemdikbud.
- [4]. Mulyasa, E. (2018). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [5]. Nitko, A. J., & Brookhart, S. M. (2014). *Educational Assessment of Students* (7th ed.). Boston: Pearson Education.
- [6]. OECD. (2019). *PISA 2018 Results: What Students Know and Can Do*. Paris: OECD Publishing.
- [7]. Priyono, O. S., & Pranarka, A. M. W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- [8]. Sihotang, H. (2022). Tantangan Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer pada Pendidikan Kesetaraan. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 17(2), 85–94.
- [9]. Sudjana, D. (2010). *Pendidikan Nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat, Teori Pendukung, Asas*. Bandung: Falah Production.
- [10]. Tilaar, H. A. R. (2012). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [11]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.